

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaan yang tua, melalui gemilangnya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram, kemudian mengalami masa penderitaan akibat penjajahan bangsa lain sepanjang tiga setengah abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan nasionalnya sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Berbagai babak sejarah telah dilampaui dan berbagai jalan telah ditempuh dengan cara-cara yang berbeda-beda, mulai dengan cara-cara yang lunak sampai cara-cara yang keras, mulai dari gerakan kaum cendekiawan yang terbatas sampai pada gerakan yang menghimpun kekuatan rakyat banyak, mulai dari bidang pendidikan, kesenian daerah, perdagangan sampai kepada gerakan-gerakan politik, tanpa memandang perbedaan agamanya, asal keturunannya, tempat tinggalnya, suku ras dan pekerjaannya.

Bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri, yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ditekankan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Manusia Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kuatnya tradisi sebagai sumber norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan pandangan hidup antara berbagai suku di Nusantara ini. Pandangan hidup kita bernegara dan berbangsa tersimpul dalam falsafah kita Pancasila. Pancasila memberikan pancaran dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya.

Pendidikan Pancasila adalah pendidikan nilai-nilai yang bertujuan membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung

dalam Pancasila. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat mengatakan “berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religious atau tidak religious”, berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu:

1. Jasmani;
2. Cipta;
3. Rasa;
4. Karsa (kehendak);
5. Kepercayaan;

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu: berguna, berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estesis), baik (nilai moral atau etis), religious (nilai agama).

Prof. Dr. Notonegoro, membagi nilai menjadi 3, yakni:

1. Nilai materiil, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas.
3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Nilai rohani ini dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu:

1. Nilai kebenaran/kenyataan, yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta);
2. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia (*gevoels*, dan *aesthetis*);
3. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia (*will, karsa, ethic*);

4. Nilai kebaikan religious yang merupakan ketuhanan, kerohanian yang tinggi dan mutlak. Nilai religious ini bersumber pada kepercayaan keyakinan manusia.

Dengan adanya dasar Ketuhanan maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya/kepercayaannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945.

Secara terperinci, pernyataan Pasal 29 UUD 1945 dan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila itu mengandung makna berikut :

- a. Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
- b. Kita melaksanakan kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Kita harus membina adanya sikap saling menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Kita harus membina adanya kerja sama dan toleransi antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Kita menginginkan adanya kerukunan antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Kita mengakui bahwa hubungan tiap warga negara (manusia) dengan Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak pribadi yang paling hakiki.

- g. Kita mengakui bahwa tiap warga negara bebas menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- h. Kita tidak memaksa agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Hal-hal yang tertera di atas (a sampai dengan g) merupakan akibat logis prinsip adanya jaminan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.

Hal ini berarti bahwa negara Indonesia yang terdiri dari atas ribuan pulau dengan lebih kurang 240 juta penduduk yang menganut beberapa agama (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) menghendaki semua agama itu hidup tenteram, rukun, dan saling menghormati. Dengan demikian, semua agama yang diakui di negara RI dapat bergerak dan berkembang dengan leluasa.

Dengan Sila Ketuhanan Yang Mahan Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan.

Sebuah studi yang dilakukan FISIP Universitas Airlangga, menemukan paling tidak ada tiga faktor sosial yang berfungsi positif mengeliminasi agar perbedaan antar-etnis dan antar-agama yang ada tidak

meruncing menjadi pergesekan sosial yang manifest. Pertama, karena adanya pola hubungan yang bersifat “*simbiosis-mutualisme*”, ia tidak akan mempersolkan status dan peran sosialnya sepanjang kedua-belah pihak masih memiliki ketergantungan, dan satu sama lain saling toleransi dengan caranya masing-masing. Dengan kata lain, tanpa harus melakukan dan terjadi asimilasi kultural, dalam hubungan yang berjalan terbangun hubungan sosial yang erat dan saling membutuhkan.

Kedua, karena adanya forum atau zona netral yang dapat dijadikan titik pertemuan anatar-etnis dan antar-agama yang secara kultural berbeda yang berfungsi dan melahirkan *cross-cutting loyalties*. Dengan menjalin komunikasi dan hubungan sosial yang intensif, antar-etnis dan antar-agama dengan yang lain bukan saja makin mengenal karakter masing-masing, tetapi di sana pelan-pelan juga mulai tumbuh kesadaran bahwa antara mereka dengan etnis dan agama yang lain memang berbeda-beda tanpa harus saling mensubordinasi. Empati dan toleransi adalah dua hal yang tumbuh bersamaan dengan makin intensifnya kegiatan yang saling menyapa antar-etnis dan antar-agama yang berbeda dalam sebuah titik pertemuan yang netral. Tak selalu interaksi sosial antar-etnis dan antar-agama yang berbeda berlangsung dengan tulus. Namun demikian, ketika masing-masing pihak menyadari pada batas demarkasi sosial mana mereka harus bekerja sama dan saling mentoleransi, maka perselisihan yang frontal pun dapat dihindari.

Ketiga, karena dukungan dan *sense of belonging* yang tinggi dari tokoh masyarakat dan agama serta lembaga sosial untuk tetap menjaga dan mencegah kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang terbuka. Setiap terjadi percikan konflik, para tokoh masyarakat dan agama, termasuk pula organisasi sosial seperti NU atau Muhammadiyah, umumnya selalu berhasil meredam lewat pendekatan sosial-kultural yang fleksibel.

Manusia adalah makhluk Tuhan, dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan hidup demikian menimbulkan

pandangan yang luas, tidak terikat oleh batas-batas negara atau bangsa sendiri, melainkan negara selalu harus membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat. Manusia mempunyai hak-hak yang sama; oleh karena itu tidaklah dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia lain, atau bangsa yang satu menguasai bangsa lain. Berhubungan dengan itu maka dasar itu tidak membenarkan adanya penjajahan di atas bumi, karena hal yang demikian bertentangan dengan peri kemanusiaan serta hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan mempunyai hak yang tidak dirampas dan dihilangkan. Hak-hak itu harus dihormati oleh siapapun. Golongan manusia yang berkuasa tidaklah diperkenankan memaksakan kehendak yang bertentangan dengan hak seseorang.

Beraneka Ragam Tetapi Satu Juga, *Bhinneka Tunggal Ika*, walaupun Indonesia terdiri dari atas bermacam-macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama, tetapi merupakan kesatuan. Bahkan, pulau-pulaunya pun berbeda-beda, tetapi masih pula merupakan satu kesatuan. *Bhinneka Tunggal Ika* berasal dari bahasa Kawi, yang artinya *berbeda-beda tetapi satu*. Seloka yang tertulis pada lambing Negara Republik Indonesia dan disahkan pada tanggal 17 Agustus 1950 itu pernah digunakan oleh Empu Tantular, pujangga besar pada jaman Majapahit, dalam buku karyanya *Sutasoma*.

Apabila kita ingin bersatu, persoalan pokoknya bukan menghilangkan perbedaan. Hal itu sangat mustahil karena bertentangan dengan kodrat. Biarlah perbedaan itu ada dan tetap ada. Yang kita usahakan adalah bagaimana caranya agar perbedaan itu dapat tetap mempersatukan kita dalam kesatuan yang indah, seperti indahnya kesatuan warna-warni pelangi yang serasi.

Persatuan dalam keanekaragaman bagi kita bukanlah hal yang mustahil. Kita telah ditempa oleh perjuangan dan sejarah yang panjang untuk bersatu. Lebih dalam lagi, kita sesungguhnya adalah bangsa yang senantiasa mencari keserasian dan keselarasan.

Setiap waktu, perpecahan selalu mengancam kita. Letak Indonesia yang berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra memang sangat menguntungkan. Perdagangan menjadi ramai dan menghasilkan banyak devisa negara. Akan tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa dalam posisi seperti itu pengaruh asing masuk dengan sendirinya. Ideologi komunis dari utara dan ideologi liberal dari selatan setiap saat siap merongrong kita. Jika bangsa kita lengah dan pendiriannya kurang kuat, niscaya kita dapat kehilangan identitas dan tenggelam dalam pengaruh dan perbudakan mereka.

Sejak dahulu kala di negara kita terdapat banyak agama. Agama Hindu dan Budha dating dari India, agama Islam masuk melalui bangsa Arab, sedangkan agama Kristen dibawa oleh orang-orang Eropa. Kehidupan semua agama dijamin oleh undang-undang dasar negara kita. Di samping itu, warga negara Indonesia terdiri dari berbagai keturunan. Selain orang Indonesia asli (pribumi), banyak juga keturunan Cina, Arab, India, Jepang, Eropa, dan keturunan asing lainnya. Hak dan Kewajiban mereka selaku warga negara sama-sama dijamin oleh UUD 1945.

Pada masa penjajahan dahulu, Belanda memanfaatkan keragaman itu dengan licik untuk memecah kekuatan yang ada di tanah air kita agar mereka mudah menguasainya. Mereka berhasil menguasai kita cukup lama, yaitu lebih dari 350 tahun. Sejak tahun 1908, para pemuda kita, terutama kaum pelajar, mulai menyadari penderitaan yang dialami bangsanya. Perjuangan yang bersifat kedaerahan kurang memenuhi harapan. Mereka mulai menanamkan semangat kebangsaan untuk melebur semangat kedaerahan dan kesukuan. Akhirnya, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai penjuru tanah air bersatu padu menyelenggarakan Kongres pemuda II. Mereka menghasilkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu Sumpah Pemuda.

Sejak saat itu, pemuda-pemuda dari berbagai suku (yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan lain-lain), dari

berbagai agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha), dan dari berbagai ras (baik pribumi maupun nonpribumi) bersama-sama menanamkan tekad di hati sanubarinya bahwa bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa persatuan, yaitu Indonesia. Berkat Sumpah Pemuda, makin kuat kesadaran kebangsaan kita dan makin dahsyat perjuangan kita. Makin kukuh persatuan kita untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kesatuan timbul dari keanekaragaman. Persatuan yang dituntut ialah persatuan yang prinsipal dan menyangkut dasar negara, yaitu Pancasila. Persatuan yang kita inginkan adalah persatuan nyata, bukan hanya kata-kata saja yang tetap menyiratkan kecurigaan dan rasa was-was. Sebab, persatuan tidak mungkin dibangun atas dasar kecurigaan atau ketegangan satu sama lain. Semua golongan harus menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongannya sendiri-sendiri. Demi kepentingan semua kelompok (nasional) dalam keanekaragaman inilah sikap toleransi sangat diperlukan.

Hidup rukun dan toleransi itu tidak berarti bahwa ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lainnya dicampuradukkan. Melalui toleransi ini, diharapkan terwujud ketenangan, ketertiban, serta keaktifan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dengan sikap saling menghormati itu, akan terbina perikehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Keadaan demikian inilah yang dapat memungkinkan terlaksananya pembangunan bangsa. Dalam usaha mewujudkan perikehidupan beragama yang penuh kerukunan dan toleransi itu, diperlukan kejujuran, kebesaran jiwa, kebijaksanaan, dan tanggung jawab.

Bangsa Indonesia sedang membangun masa depannya. Pembangunan yang menyeluruh itu menghadapi beraneka tantangan yang berat, termasuk pembangunan agama, yakni pelaksanaan kehendak Ilahi seperti diimani oleh para penganut dan umat beragama. Di satu pihak, peningkatan dan intensifikasi penghayatan agama dan kepercayaan itu tidak boleh mengganggu

atau menghambat pembangunan umum, melainkan seharusnya mendukung dengan menyajikan nilai, motivasi, dan kritikan keagamaan. Di lain pihak, kerukunan jangan sampai melemahkan semangat hidup beragama itu sendiri. Oleh karena itu, sasaran utama dari pembangunan kehidupan beragama adalah pembinaan kerukunan hidup beragama di kalangan bangsa kita. Kita menyadari bahwa tanpa beragama, tidak mungkin tercipta kerukunan nasional yang menjadi persyaratan persatuan dan kesatuan bangsa.

Jadi, alasan sosiologi untuk mengokohkan kerukunan dalam bidang agama ialah pembangunan hidup nasional, yang tidak boleh ditunda-tunda dan tidak boleh diganggu oleh perselisihan karena agama. Dari kerukunan dalam bidang agama, diharapkan lahir pengaruh baik pada pembangunan dalam arti umum.

Dari pihak pemerintah, lembaga swasta, dan dari semua orang yang ingin memajukan kerukunan dalam bidang agama, dapat diharapkan sumbangan yang berbeda-beda. Yang diharapkan ialah kemauan bersatu untuk saling membantu. Jika tidak saling membantu, setidaknya kita tidak saling mengganggu. Tidak mengganggu berarti tidak memaksakan agama kepada siapa pun, tidak menghalangi orang lain hidup sesuai dengan keyakinan agamanya, tidak menyinggung perasaan, tidak mengganggu ketenangan umum dengan alasan agama, tidak mencari penganut dengan cara tidak wajar (misalnya penipuan, tekanan, imbalan materiil), dan tidak menghalangi umat lain mengamalkan agamanya dengan tenang. Itulah sumbangan yang *paling minimal*.

Sumbangan *positif paling penting* ialah berusaha saling mengenal, mengerti, dan menghargai dalam perbedaan, bukan hanya mengenai ajaran melainkan juga mengenai orang dan umat. Lalu yang lain ialah mengenai ajaran dan dialog karya, yakni bekerja sama dalam usaha dan lembaga sosial, budaya serta politik, membina hubungan baik dan akrab dengan orang yang

beragama lain, atau saling mengunjungi pada perayaan hari raya masing-masing.

P4 menegaskan, “Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa”. Mengapa kemerdekaan itu begitu penting? Sebab, hanya orang merdeka yang merasa sejajar, dihargai, dan setingkat dengan sesamanya. Dengan demikian, rasa curiga, takut, was-was, dan bermusuhan hilang; hidup damai dan rukun satu sama lain.

Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 meletakkan landasan dan kerangka yang kuat bagi semua upaya pembangunan nasional jangka panjang tahap II (tahap tinggal landas). Karenanya, kebijaksanaan di dalam Garis-saris Besar Haluan Negara bersifat mendasar dan strategis. Salah satu sarannya ialah pembangunan bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan antarumat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama, maka akan makin memperkuat landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis dan dalam kukuhnya persatuan serta kesatuan bangsa, selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Berdasarkan esensi nilai sasaran ini, maka berbagai sasaran pokok kemudian dijabarkan lebih jauh. Sasaran pokok tersebut di antaranya ialah:

- a. Atas dasar keimanan dan ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

- b. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kerukunan antarumat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dalam usaha memperkukuh persatuan dan kesatuan Bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.
- c. Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, kehidupan beragama dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan, naik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial masyarakat.
- d. Diusahakan supaya terus bertambah sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk sarana pendidikan agama di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, termasuk prasekolah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melanjutkan usaha untuk terus meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- f. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.

Hakikat pembangunan bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah bagian integral dari tujuan dan upaya pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Rumusan GBHN menjelaskan bahwa atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan manusia dan

masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama, dan alam sekitarnya, memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah, serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong yang berkembang sehingga sanggup dan mampu melanjutkan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang.

Hakikat pembangunan nasional, ialah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya sebagai subjek berkualitas yang menentukan tegak-lestarinya bangsa, negara, dan kemerdekaan/kedaulatan bangsa, yang terpusat dan bertumpu pada kualitas manusia. Kualitas yang dimaksud adalah kualitas keimanan dan ketaqwaan sebagai esensi kesadaran moral spiritual (keagamaan). Hal itu nantinya akan menjadi pedoman dan kendali pribadi manusia dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, atau melaksanakan amanat dan kewajiban hidup pribadi, sosial-budaya, nasional dan internasional (kemanusiaan).

Bangsa dan negara kita, melalui kesepakatan dalam GBHN, menetapkan bahwa manusia sebagai sumber daya merupakan pusat dan subjek pembangunan. Juga diakui bahwa esensi kualitas kepribadian yang bersumber pada iman dan ketaqwaan sebagai dasar modal spiritual akan menjadi landasan dan kunci bagi terwujudnya amal bakti dan karya yang mencerminkan masyarakat adil makmur.

Kerukunan beragama di tengah keanekaragaman budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah teruji sebagai alternatif yang paling tepat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk di bawah suatu sistem pemerintahan yang demokratis.

Penjelasan yang bagaimanapun adanya tentang agama, tak akan pernah tuntas tanpa mengikutsertakan aspek-aspek sosiologisnya. Agama,

yang menyangkut kepercayaan serta berbagai prakteknya, benar-benar merupakan masalah sosial yang sampai saat ini senantiasa ditemukan dalam setiap masyarakat manusia di mana kita memiliki berbagai catatan, termasuk yang biasa diketengahkan dan ditafsirkan oleh para arkeologi.

Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama merupakan salah-satu struktur institusional penting yang melengkapi seluruh sistem sosial. Masalah inti dari agama tampaknya menyangkut sesuatu yang masih kabur serta tidak dapat diraba, yang realitas empirisnya sama sekali belum jelas. Ia menyangkut dunia luar (*the beyond*), hubungan manusia dengan sikap terhadap dunia luar itu, dan dengan apa yang dianggap manusia sebagai implikasi praktis dari dunia luar tersebut terhadap kehidupan manusia. Dalam kalimat sosiolog Itali Vilfredo Pareto; masalah ini menyangkut dengan apa yang disebut “pengalaman transender”, mengartikan pengalaman atas kejadian yang ada sehari-hari dan yang dapat diamati atau penyaringan dan penanganan yang sistematis terhadap pengalaman secara ilmiah.

Perbandingan aktivitas keagamaan dengan aktivitas lain atau perbandingan lembaga keagamaan dengan lembaga sosial lain, menunjukkan bahwa agama, dalam pautannya dengan masalah yang tidak dapat diraba itu (*the beyond*) merupakan sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang sepele dibandingkan bagi masalah pokok manusia. Namun kenyataannya menunjuk lain. Sebenarnya lembaga keagamaan adalah menyangkut hal yang mengandung arti penting tertentu, menyangkut masalah aspek kehidupan manusia, yang dalam transendensinya, mencakup sesuatu yang mempunyai arti penting dan menonjol bagi manusia. Bahkan sejarah menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keagamaan merupakan bentuk asosiasi manusia yang paling mungkin untuk terus bertahan.

Agama telah dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling sublime; sebagai sejumlah besar moralitas, sumber tatanam masyarakat dan perdamaian batin individu; sebagai sesuatu yang memuliakan dan yang

membuat manusia beradab. Tetapi agama telah pula dituduh sebagai penghambat kemajuan manusia, dan mempertinggi fanatisme dan sifat tidak toleran, pengacuhan, pengabaian, tahayul dan kesia-siaan. Catatan yang ada menunjuk agama sebagai salah satu penghambat tatanan sosial yang telah mapan. Tetapi agama juga memperlihatkan kemampuan melahirkan kecenderungan yang sangat revolusioner. Emile Durkheim seorang pelopor sosiologi agama di Perancis mengatakan bahwa agama merupakan sumber semua kebudayaan yang sangat tinggi, sedang Karl Marx mengatakan bahwa agama adalah candu bagi manusia. Jelas agama menunjukkan seperangkat aktivitas manusia dan sejumlah bentuk-bentuk sosial yang mempunyai arti penting.

Hubungan agama dengan masyarakat menyajikan sebuah dilema fundamental yang bisa dikedepankan dalam tiga aspek. Pertama dan yang terpenting, agama melibatkan manusia pada situasi akhir di titik mana lahir kesadaran akan hal tertinggi. Di sini masalah makna tertinggi dan kedudukan manusia di dalam segala rencana tampil ke permukaan. Masalah-masalah ini tampil dalam urgensi yang terkenal dengan kata-kata modern sebagai "eksistensial". Yang kedua, agama menyangkut hal-hal yang suci karena itu agama berkenaan dengan pemahaman dan tanggapan khusus yang membutuhkan keluhuran pandang atas objeknya. Agama merupakan model kesadaran yang sangat lain disbanding dengan suasana sekuler atau profane dari kepentingan manusia dan tindak tanduknya, secara fundamental ia disebut heterogen. Ketiga, agama dilandaskan pada keyakinan, karena itu objeknya adalah supraempiris dan ajarannya tidak mungkin diperagakan atau dibuktikan secara empiris.

Indonesia merupakan negara yang multikultur, dengan wilayah geografis dan budaya yang berbeda-beda menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Hal tersebut sering menjadi pemicu adanya konflik antar umat beragama di Indonesia. Agama-

agama yang ada di Indonesia berbeda satu sama lain, walaupun diantara agama-agama itu terdapat persamaan-persamaan. Kasus-kasus kerusuhan di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh perbedaan agama. Konflik-konflik yang terjadi antar individu, golongan, dan bangsa yang disebabkan oleh faktor agama, adalah suatu pertanda bahwa di antara agama-agama yang ada terdapat suatu perbedaan yang prinsipil. Oleh sebab itu perlunya diciptakan suatu aturan bagi umat beragama di Indonesia untuk tetap hidup bersatu, walaupun mempunyai latar belakang agama yang berbeda.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerukunan antara umat beragama akan tercipta apabila tiap-tiap orang dari pemeluk suatu agama dapat saling tenggang rasa dan menanamkan sikap toleransi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang *“INTEGRASI ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di definisikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah :

- ✚ Bagaimana integrasi antar umat beragama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- ✚ Mengetahui wujud integrasi antar umat beragama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang berjudul “INTEGRASI ANTAR UMAT BERAGAMA DI DESA KLEPU KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO”, memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah :

1. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang bersangkutan dan tentunya bermanfaat bagi khalayak umum.

2. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian yang sudah dilakukan ini dapat berguna untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan dalam memahami fenomena yang berkembang, khususnya mengenai harmonisasi kerukunan umat beragama yang terjadi dalam masyarakat dan dengan temuan yang ada diharapkan dapat menjadi masukan dalam kebijakan keragaman umat beragama di tingkat kabupaten.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah atau dengan kata lain definisi konseptual adalah untuk memberikan dan memperjelas makna atau arti istilah – istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus bahasa agar tidak salah menafsirkan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain :

1. Integrasi adalah

Marbun B. N. (2005:231) mengemukakan bahwa integrasi mempunyai arti penggabungan, peleburan, perpaduan dari yang berbeda dalam satu sistem atau harmoni.

Vocabulaire Philosophique Lalande memberikan definisi integrasi sebagai “dibangunnya interpendensi yang lebih rapat antara

bagian-bagian dari organism hidup atau antara anggota-anggota dalam masyarakat”. Integrasi karena itu adalah proses mempersatukan masyarakat, yang cenderung membuatnya menjadi suatu kota yang harmonis, yang didasarkan pada tatanan yang oleh anggota-anggotanya dianggap sama harmonisnya.

2. Umat adalah

Para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama; penganut nabi. (Marbun B. N. 2005:545)

3. Agama adalah

Perkataan agama berasal dari bahasa Sansekerta, yang berarti antara lain peraturan tradisional, ajaran, kumpulan peraturan ajaran; pendeknya apa saja yang turun-temurun dan ditentukan oleh kebiasaan. Akar kata agama adalah “gam” yang berarti “pergi”, sedangkan awalan “a” berarti “tidak”, sehingga agam(a), berarti tetap atau “yang tidak berubah”. Dalam bahasa Jawa Kuno agama digunakan juga (kitab) hokum adat dan kebiasaan keagamaan dan moral. Lalu arti kata ini berkembang, sehingga diseluruh kepulauan Nusantara mendapat arti seperti adat, upacara, pandangan hidup, dan percayaan, sekarang kata agama (igama,ugama) digunakan dalam arti yang sama dengan religi. (Marbun B. N. 2005:11)

Elizabeth K. Nottingham (1994:3) mengemukakan bahwa agama adalah gejala yang begitu sering “terdapat di mana-mana” sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk membuat abstrak ilmiah. Agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama telah menimbulkan khayalnya yang paling luas dan juga digunakan untuk membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain. Agama dapat membangkitkan

kebahagiaan batin yang paling sempurna, dan juga perasaan takut dan ngeri.

F. Landasan Teori

Untuk memecahkan permasalahan yang timbul diperlukan adanya jawaban atas penyebab dan akibat dari fenomena yang terjadi, jawaban tersebut dapat diperoleh dari suatu teori yang mendasari dari persoalan tersebut. Teori itu akan menjembatani antara konsep-konsep yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan.

1. UUD 1945 dan P4

Dengan adanya dasar Ketuhanan maka Indonesia mengakui dan percaya pada adanya Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Dasar ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya/kepercayaannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945.

Secara terperinci, pernyataan Pasal 29 UUD 1945 dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila itu mengandung makna berikut :

- a. Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
- b. Kita melaksanakan kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Kita harus membina adanya sikap saling menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- d. Kita harus membina adanya kerja sama dan toleransi antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Kita menginginkan adanya kerukunan antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- f. Kita mengakui bahwa hubungan tiap warga negara (manusia) dengan Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak pribadi yang paling hakiki.
- g. Kita mengakui bahwa tiap warga negara bebas menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Kita tidak memaksa agama dan kepercayaan kita kepada orang lain. Hal-hal yang tertera di atas (a sampai dengan g) merupakan akibat logis prinsip adanya jaminan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.

Hal ini berarti bahwa negara Indonesia yang terdiri dari atas ribuan pulau dengan lebih kurang 240 juta penduduk yang menganut beberapa agama (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) menghendaki semua agama itu hidup tenteram, rukun, dan saling menghormati. Dengan demikian, semua agama yang diakui di negara RI dapat bergerak dan berkembang dengan leluasa.

Dengan Sila Ketuhanan Yang Mahan Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

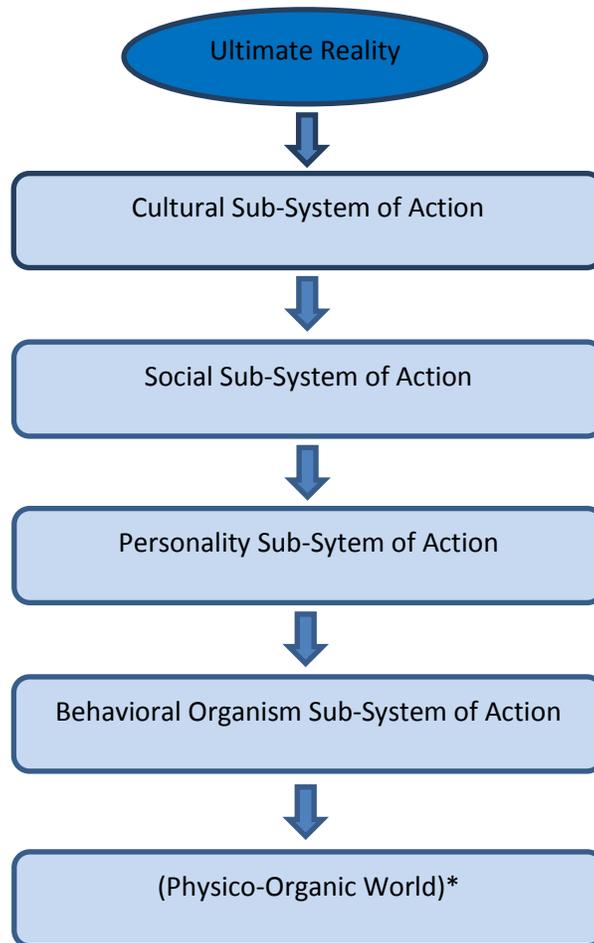
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan.

2. Teori Fungsional

Asumsi dasar teori fungsional terletak pada cara pandang yang menyatakan bahwa masyarakat (sebagai sistem sosial) terintegrasi oleh adanya kesepakatan bersama, *collective consciousness*. Kebersamaan dan kohesi sosial dimungkinkan karena adanya hubungan fungsional antarbagian pembentuk sistem, *interdependency*. Dengan demikian, kondisi masyarakat akan selalu dalam keadaan *equilibrium*. Seandainya ada perubahan-perubahan baik karena faktor internal maupun eksternal, perubahan itu diyakini tidak akan sampai mengganggu integritas sosial atau keseimbangan sosial, sebab sifat perubahan yang terjadi lebih bersifat *gradual* ketimbang mendasar.

Talcott Parson sebagai tokoh utama paradigma ini mengajukan teori tentang tindakan manusia. Tentang hal ini ia membedakan ke dalam empat subsistem: *organisme*, *personality*, *sistem sosial*, dan *sistem kultural*. Keempat unsur ini tersusun dalam urutan sibernetika (*cybernetic order*) yang menurut Parson sebagai unsur yang mengendalikan tindakan manusia. Perhatikan bagan berikut ini:

GENERAL SYSTEM OF ACTION



Semua tindakan manusia ditentukan oleh keempat subsistem: budaya, sosial, kepribadian, dan organisme. Sistem kultural merupakan sumber ide, pengetahuan, nilai, kepercayaan, dan simbol-simbol. Dalam hubungan sibernatika Person, posisi sistem sangatlah sentral, kunci pengatur interaksi antar-individu. Sedangkan ketiga subsistem lainnya dalam hubungannya dengan sistem sosial tidak lebih sebagai lingkungan utama. Person memformulasikan konsep *functional imperatives* terutama dalam kaitannya dengan masalah kelangsungan hidup sistem sosial. Maksudnya, masyarakat harus memenuhi keempat fungsi utama berikut, kalau tidak ingin punah.

1. *Adaptation of the Environment Performed by the economy*
2. *Goal Attainment-Performed by the Government*
3. *Integration (Linking the Institutions Together) Performed by the Legal Institutions and Religion*
4. *Latency (Pattern Maintenance of Values from Generation to Generation) Performed by the Family and Education*

Person meyakini bahwa perkembangan masyarakat berarti erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama: kultural (pendidikan), kehakiman (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan), dan ekonomi (adaptasi). Dalam rangka fungsi *interdependency* sistem secara keseluruhan semakin besar pula kemampuannya menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, dan ini berarti semakin maju masyarakat yang bersangkutan.

Robert K. Merton, menurutnya banyak hal penting dalam perkembangan penelitian sosiologi agama sangat dipengaruhi oleh sudut pandang sosiologis yang dikenal sebagai “teori fungsional”. Sebagai kerangka acuan penelitian empiris, teori fungsional memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan; yang memolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama serta dianggap sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. Lembaga-lembaga yang kompleks ini secara keseluruhan merupakan sistem sosial yang sedemikian rupa di mana setiap bagian (masing-masing unsur kelembagaan itu) saling tergantung dengan semua bagian lain, sehingga perubahan salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lain yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sistem keseluruhan. Dalam pengertian ini, agama merupakan salah-satu bentuk perilaku manusia yang telah terlembaga. Dengan kata lain sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial, lembaga sosial itu mempunyai fungsi manifest dan fungsi laten. Sehubungan dengan subjek ini timbul masalah yaitu sejauh mana fungsi manifest dan laten lembaga keagamaan dalam memelihara keseimbangan seluruh sistem sosial.

Kemudian, teori fungsional melihat kebudayaan menyatu dengan sistem sosial dalam arti ia berada dalam batasan sarana dan tujuan, proskripsi dan preskripsi, yang membenarkan dan yang dilarang, dengan menentukan peranan di mana anggota masyarakat menghadapi harapan-harapan situasi sosial mereka yang telah mapan. Agama dengan referensi transendensi ke dunia di luar jangkauan itu merupakan aspek penting fenomena kultural. *Kebudayaan bagi manusia merupakan kreasi dunia penyesuaian dan kemaknaan, dalam konteks mana kehidupan manusia dapat dijalankan dengan penuh arti.* Dengan demikian kebudayaan memasuki pemikiran dan perasaan manusia dan penting bagi bentuk-bentuk sosial yang tampil atas kesengajaan manusia. Wandell T. Bush, seorang sarjana agama yang terkemuka dari Amerika menyatakan, “agama merupakan bagian dunia imajinasi yang sangat penting yang berfungsi secara sosial, dan ungkapan verbalnya hanya merupakan peragaan bagian terkecil saja”.

Menurut George C. Homans teori fungsional melihat manusia dalam masyarakat sebagai ditandai oleh dua tipe kebutuhan dan dua jenis kecenderungan bertindak. Demi kelanjutan hidupnya, manusia harus bertindak terhadap lingkungan, baik dengan cara menyesuaikan diri pada lingkungan itu atau menguasai dan mengendalikannya. Masyarakat manusia, beserta kebudayaan yang merupakan sarana survival manusia dan masyarakat, sering membutuhkan kematian sebagai anggota demi kelanjutan hidup mereka. Manusia tidak pernah mencurahkan dirinya pada “kegiatan, interaksi dan sentimen” yang perlu bagi kelanjutan hidup kelompok, tetapi menyempurnakan unsur-unsur ini jauh melampaui berbagai kebutuhan kelangsungan hidup. Aksioma teori fungsional ialah segala hal yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Karena agama sejak dulu sampai saat ini masih ada, jelas bahwa agama mempunyai fungsi, atau bahkan memerankan sejumlah fungsi.

Teori fungsional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni transendensi pengalaman sehari-harinya dalam lingkungan alam. Teori fungsional memandang kebutuhan demikian itu sebagai hasil dari tiga karakteristik dasar eksistensi manusia. *Pertama*, manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian, hal yang sangat penting bagi keamanan dan kesejahteraan manusia berada di luar jangkauannya. Dengan kata lain eksistensi manusia, ditandai oleh ketidakpastian. *Kedua*, kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan untuk mempengaruhi kondisi hidupnya, walaupun kesanggupan tersebut kian meningkat, pada dasarnya terbatas. Pada titik dasar tertentu, kondisi manusia dalam kaitan konflik antara keinginan dengan lingkungan ditandai oleh ketidakberdayaan. *Ketiga*, manusia harus hidup bermasyarakat, dan suatu masyarakat merupakan suatu alokasi yang teratur dari berbagai fungsi, fasilitas, dan ganjaran. Agama dalam artian ini dipandang sebagai “mekanisme” penyesuaian yang paling dasar terhadap unsur-unsur yang mengecewakan dan menjatuhkan.

Robert F. Bales beranggapan bahwa teori fungsional menumbuhkan perhatian kita pada sumbangan fungsional agama yang diberikan terhadap sistem sosial. Agama dengan kedekatannya pada sesuatu yang berada di luar jangkauan dan keyakinannya bahwa manusia berkepentingan pada sesuatu pandangan yang di luar jangkauan itu telah memberikan suatu pandangan realitas supra-empiris menyeluruh yang lebih luas. Konteks realitas ini, kekecewaan dan frustrasi yang dibebankan oleh ketidakpastian dan ketidakmungkinan dan oleh tatanan masyarakat manusia yang telah terlembaga, akan terlihat dalam berbagai pengertian yang ultima sebagai bermakna dan ini memungkinkan penerimaan dan penyesuaian dengannya. Apa lagi dengan memperlihatkan norma dan peraturan masyarakat sebagai bagian dari tatanan etis supra-empiris yang lebih besar, telah ditetapkan dan

disucikan oleh kepercayaan dan praktek agama, maka agama dalam hal ini telah mendorong penguatan pelaksanaannya, bila ternyata tindakan umat bertentangan dengan keinginan atau kepentingan undang-undang atau norma tersebut. Ia juga memberi kemungkinan untuk memahami fenomena lain yang hampir universal, yang sangat erat hubungannya dengan agama itu sendiri, yaitu, magis. Magis sebagai seperangkat kepercayaan dan praktek dalam berbagai bentuk adalah karakteristik masyarakat manusia. Agama dan magis memiliki kebersamaan konsepsi tentang dunia luar atau sesuatu yang di luar jangkauan, yakni ide aspek realitas supra-empiris.

Dari sudut teori fungsional agama telah dibatasi sebagai *“pendayagunaan sarana non-empiris atau supra-empiris untuk maksud-maksud non-empiris atau supra-empiris; sedangkan magis adalah pendayagunaan sarana non-empiris atau supra-empiris untuk maksud-maksud empiris”*. Tetapi penggunaan istilah “manipulasi” dalam definisi agama, tidak tepat dan gagal menggambarkan sikap keagamaan. Agama menawarkan apa yang dirasakan sebagai jalan untuk memasuki hubungan dengan aspek-aspek realitas supra-empiris, apakah itu diartikan sebagai Tuhan, dewa ataupun sebaliknya. Magis berbeda dengan agama dalam arti ia memiliki esensi manipulative; tetapi manipulasi magis ini juga dilakukan dalam suasana ketakutan dan penghormatan, keharuan dan keajaiban, yang mirip dengan apa yang merupakan ciri relasi keagamaan.

3. Teori Agama

Secara umum, kajian tentang agama setidaknya terbagi ke dalam dua dimensi, yakni teologis dan sosiologis. Kajian agama dalam corak teologis berangkat dari adanya klaim tentang kebenaran mutlak ajaran suatu agama. Doktrin-doktrin keagamaan yang diyakini berasal dari Tuhan, kebenarannya juga diakui berada di luar jangkauan kemampuan pikiran manusia sehingga ia semata-mata menjadi ajaran yang cukup diimani saja, *pokoknya iman*. Oleh

karena itu, teologi sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji agama, tidak pernah bisa beranjak dari *frame* dia atas, yaitu keimanan mutlak terhadap kebenaran ajaran agama yang diyakininya. Bahkan misi sesungguhnya dari teologi adalah mempertahankan doktrin agama dengan menggunakan term-term yang rasional-filosofis, sehingga tidaklah mengherankan jika ahli filsafat agama juga ikut ambil bagian dalam ahli teologi ini (Shcarf, 1995).

Berbeda dari dimensi teologis, dimensi sosiologis melihat agama sebagai salah satu dari institusi sosial, sebagai subsistem dari sistem sosial yang mempunyai fungsi sosial tertentu, misalnya sebagai salah satu pranata sosial, *social institution*. Karena posisinya sebagai subsistem, maka eksistensi dan peran agama dalam suatu masyarakat tak ubahnya dengan posisi dan peran subsistem lainnya, meskipun tetap mempunyai fungsi yang berbeda. Dengan kata lain, posisi agama dalam suatu masyarakat bersama-sama dengan subsistem lainnya (seperti subsistem ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain-lain) mendukung terhadap eksistensi suatu masyarakat. Dalam konteks kajian sosiologi seperti ini, agama tidak dilihat berdasar apa dan bagaimana isi ajaran dan doktrin keyakinannya, melainkan bagaimana ajaran dan keyakinan agama itu dilakukan dan mewujudkan dalam perilaku para pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, sesungguhnya dimensi (doktrin) teologi tidak pernah berdiri sendiri, terlepas dari jaringan institusi atau institusi sosial yang mendukung eksistensinya. Kepentingan sosial, ekonomi, dan politik selalu menyertai pemikiran teologis yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dari sinilah muncul kajian empiris terhadap fenomena keberagamaan manusia. Kajian agama yang bercorak sosiologis ini meletakkan *agama* dan keberagamaan manusia semata-mata sebagai gejala sosial (Abdullah, 1996).

Kajian mengenai agama dan kaitannya dengan masyarakat, selain bukan mengenai hal yang baru, juga bukan hanya paling tidak di awal perkembangannya monopoli ilmuwan Barat. Bahkan jauh sebelum pengkaji

Barat muncul, telah banyak ilmuwan nonBarat, khususnya dari Timur tengah yang mengkaji secara ilmiah tentang agama. Misalnya, At-Tabari (wafat 923 M) pernah menulis mengenai agama Persia; Al-Mas'udi menulis mengenai agama Yahudi, Kristen, dan agama-agama India; dan Al-Biruni (wafat sekitar 1050), ilmuwan terbesar di antara mereka, sampai sekarang merupakan sumber penting untuk mengenal kehidupan agama di India pada abad pertengahan.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan Van Bruinessen, syahrastani (yang wafat tahun 1153) telah menulis tentang *Studi Sistematis Sejarah Agama* yang pertama kali, kemudian diikuti oleh pengarang lainnya. Ibnu Khaldun (wafat 1382), pemikir sangat cemerlang, beberapa ahli menyebut sebagai “*Bapak Sosiologi Pertama*” sebelum August Comte, juga telah melakukan kajian semua aspek kehidupan, termasuk fenomena keagamaan, melalui kacamata kritis layaknya seorang sosiolog.

Tiga tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial yang dianggap sebagai *the founding fathers* adalah Karl Marx (dengan rekannya Friderich Eagels) dan, terutama, Max Weber dan Emile Durkheim yang paling banyak menyumbang terhadap perkembangan kajian agama.

Pemikiran-pemikiran yang paling banyak terlibat antara lain adalah F. Max Muller (1849;1862;1872), Herbert Spencer, Edward Taylor, Robert Marett, James Frazer, David McLennan. Masing-masing menawarkan teori tentang asal-usul agama dan perkembangannya dalam kerangka pikir evolusioner.

Max Muller, melalui buku *Introduction to the Science of Religion* (1873), mengatakan setiap masyarakat terhadap agama, baik dari yang sangat “primitif” sampai yang paling “maju”. Semua agama ini pada intinya berdasarkan *a perception of in the Infinite*, persepsi dari Yang Tak Terhingga dan Kekal. Baginya, semua agama mengandung suatu kebenaran, karena: “*However childish a religion maybe, it always places the human soul in the*

presence of God; and however imperfect or childish the perception of God maybe, it always represent the highest ideal of perfection which the human soul can reach and grasp."

Edward Taylor, penemu istilah *animisme*. Melalui bukunya, *Primitive Culture* (1871), dan di buku inilah ia melontarkan teorinya mengenai agama. Bagi Taylor, bentuk agama yang paling awaal adalah *the belief in spiritual beings*. Kepercayaan ini diberi nama animism. Dalam visi Taylor mengenai evolusi agama, di samping arwah-arwah dan makhluk-makhluk halus itu, muncul dewata; kemudian di antara para dewata itu salah satunya muncul sebagai dewa atau Tuhan yang terbesar, dan akhirnya dewata yang lain tidak diakui lagi. Dengan kata lain, animisme berkembang menjadi *politeisme*, dan dari politesme lahirlah *monoteisme* sebagai bentuk agama yang paling tinggi.

Herbert Spencer dalam *The Principles of Sosiology* (1876), ia melihat asal-usul agama dalam *ancestor worship*, pujaan para leluhur. Kemudian satu jenis leluhur mendapat kehormatan yang luar biasa, raja-raja, dan leluhur para raja didewakan dan menjadi tujuan upacara-upacara keagamaan. Kata-kata yang dipakai untuk menyebut Allah mungkin juga mencerminkan bahwa kata itu berasal dari tradisi raja yang didewakan: Rabb, Tuhan, Gusti, Pangeran.

Robbert Marett, lebih banyak membicarakan tentang tahap perkembangan agama senelum animisme. Pada tahun 1899, hampir 30 tahun sesudah dirumuskannya teori Taylor, bahwa ada konsep kekuatan gaib yang tak terwujud, yang bukan roh atau makhluk halus, melainkan semacam zat yang bisa menghuni benda atau manusia. Ia menanamkan kekuatan ini dengan *mana* (kata dari bahasa Malanesia), yang dalam bahasa Indonesia sama dengan *kesaktian* atau *karamah*. Ia meyakini kepercayaan akan kesaktian itu sudah ada sebelum animisme. Kepercayaan ini kadang-kadang disebut *dinamisme* (bahasa Yunani *dynamos*: kekuatan, tenaga).

Dalam bukunya yang berjudul *The Worship of Animals and Plants* (pujaan binatang dan tumbuhan), dan mengangkat tetomisme sebagai ide

dasar teori baru mengenai evolusi agama, MacLennan (1827-1881) mengemukakan bahwa totemisme (dari kata *totem*) merupakan suatu kepercayaan dan sistem ritual yang mengaitkan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat (misalnya, sebuah marga dengan suatu jenis binatang binatang atau, kadang-kadang, tumbuhan). Jika dalam masyarakat ada beberapa marga, maka biasanya masing-masing mempunyai totemnya. Menurut hipotesa MacLennan, totemisme-lah bentuk awal agama. Dalam agama-agama lain masih terlihat sisa-sisa totemisme, misalnya dalam larangan memakan binatang tertentu atau sebaliknya dalam upacara kurban (di mana binatang tertentu menjadi kurban mewakili masyarakat).

Frazer, melalui karyanya *The Golden Bough* yang terbit pada tahun 1890, banyak membicarakan tentang magi dan religi, dan magi sebagai suatu tahap kepercayaan dan praktik sebelum munculnya religi/agama. Magi adalah berdasarkan proses pemikiran rasional (walaupun salah), yang mengaitkan satu hal dengan hal lain. Ciri khas magi, yang membedakannya dari religi, adalah di dalam magi tidak ada intervensi dari dunia gaib, tidak ada roh atau dewa yang membantu dalam proses maginya. Sedangkan ciri khas religi adalah kepercayaan akan makhluk gaik, dewata, dan atau Tuhan, dan manusia meminta tolong padanya. Menurut Frazer, religi baru muncul kalau masyarakat sudah kecewa dengan magi dan menyadari bahwa akibat yang diharapkan tidak otomatis muncul dengan tindakan simbolis.

Emile Durkheim (Perancis, 1858-1917), dalam bukunya yang berjudul *Les Formes Elementaires De La Vie Religion* (bentuk-bentuk awal kehidupan agama), yang diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1912, Emile Durkheim melihat bahwa semua agama membedakan antara hal-hal yang dianggap *sakral* dan yang dianggap *profan*. Yang sakral adalah hal-hala yang dipisahkan daripada yang lain yang dilarang. Terdapat benda sakral, tempat sakral, waktu sakral, kata sakral. Sakral bisa mempunyai konotasi “suci”, bisa juga berarti “berbahaya, terlarang”. Durkheim menawarkan definisi agama

sebagai berikut : “*suatu agama adalah sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral, yaitu hal-hal yang dipisahkan dari dilarang kepercayaan dan perilaku yang mempersatukan semua penganutnya menjadi satu komunitas moral, yaitu berdasarkan nilai-nilai bersama, yang disebut umat*”. Dengan kata lain, masyarakat yang tidak ingin terpecah memerlukan agama. Walaupun Durkheim sendiri seorang atheis, dalam semua karyanya ia berulang kali menekankan sumbangan positif agama terhadap kesehatan masyarakat..

4. Teori Integrasi

Maurice Duverger, suatu integrasi sosial yang murni tak mungkin terwujud dalam masyarakat tanpa adanya suatu perkembangan solidaritas sosial antara para anggotanya. Integrasi dan konflik bukan melulu dua aspek yang kontradikter di dalam politik; mereka juga saling melengkapi satu sama lain. Antagonisme menghasilkan konflik, akan tetapi, dalam kesempatan tertentu, juga menolong membatasi konflik dan meningkatkan integrasi. Dua wajah Janus – pergolakan dan integrasi tidak dapat dipisahkan. Pada tempat pertama, tidaklah selalu mudah untuk dibedakan. Rejim-rejim politik, misalnya, memberikan perhatian. Bilamana legitimasi suatu rejim ditantang, dia menjadi senjata untuk terjadinya pergolakan; bilamana dia diterima oleh konsensus, dia menjadi alat integrasi. Banyak ide yang telah kita teliti sejauh ini di dalam kerangka konflik bisa juga dipelajari di dalam kerangka integrasi.

Berbicara secara umum, kekuasaan dan Negara ikut campu dalam proses integrasi dan empat cara: (1) dengan merumuskan aturan-aturan dan prosedur; (2) dengan mengorganisir pelayanan-pelayanan kolektif dan pola umum dari aktivitas sosial; (3) dengan memberikan pendidikan bagi warganegara; dan (4) dengan mempergunakan kekuatan dalam menghadapi mereka yang merusak hukum.

Vocabulaire Philosophique Lalande memberikan definisi integrasi sebagai “dibangunnya interdependensi yang lebih rapat antara bagian-bagian

dari organisme hidup atau antara anggota-anggota dalam masyarakat”. Integrasi meliputi dua aspek, satu yang negative, yang lain positif. Integrasi menerima bukan saja eliminasi konflik akan tetapi juga pengembangan solidaritas.

G. Definisi Operasional

Menurut Juliansyah Noor (2011:97) Definisi Operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variable agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari suatu konsep atau variable. Dimensi (indikator) dapat berupa perilaku, aspek, atau sifat karakteristik.

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama merupakan bagian usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran hubungan antar manusia yang berlainan agama, sehingga setiap golongan umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agama masing-masing.

Bila ditinjau dari kepentingan agama-agama itu sendiri serta urgensinya dalam membangun dan membina masyarakat dan bangsa, maka kerukunan antar umat beragama harus terdiri dari beberapa faktor, yaitu :

1) Terpeliharanya Eksistensi Agama-Agama

Agama adalah milik Allah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan-Nya kepada manusia dengan ketentun; manusia harus menjaga dan memelihara amanat yang dipercayakan Tuhan. Penganut suatu agama harus didukung oleh ilmu (pengetahuan) dan amal perbuatan. Amal dimanifestasikan dalam dua pola hubungan; hubungan vertikal yang rutin dengan Khaliknya, dan hubungan horizontal antara sesama makhluk Tuhan.

2) Terpeliharanya Eksistensi Pancasila dan UUD 45

Pancasila dengan rumusan sederhana ini mempunyai ruang lingkup dan daya jangkau yang jauh bagi insan Indonesia

dalam berbangsa dan bernegara yang dapat disimpulkan dalam dua pengertian, yaitu: sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, dan sebagai falsafah dan pandangan hidup Indonesia.

3) Terpeliharanya Persatuan dan Rasa Kebangsaan

Memelihara rasa kebangsaan tidak akan melemahkan ikatan atau solidaritas golongan dalam hal ini golongan agama. Rasa kebangsaan menghilangkan rasa asing dan sikap permusuhan antara golongan.

4) Terpeliharanya Stabilitas dan Ketahanan Nasional

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius, agama mempunyai andil yang tidak ternilai dalam mencapai, mengisi, memelihara kemerdekaan dan membina ketahanan nasional. Bertitik tolak kepada kenyataan ini maka ketahanan nasional diperkuat dengan menetapkan pembinaan kehidupan beragama dalam masyarakat dan bangsa. Dengan beragumlah ditanamkan kesadaran untuk tidak bersikap apatis dalam membina ketahanan nasionalnya sendiri.

5) Tertunjang dan Tersukseskannya Pembangunan

Bangsa Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, sila pertama menunjukkan bahwa kesadaran moral bangsa Indonesia ditumbuhkan oleh agama. Moral yang ditumbuhkan oleh agama mempunyai daya kekuatan rohaniyah yang tidak pernah absen dalam menuntun dan mengendalikan penyandangannya agar ia selalu selalu berada dalam garis batas norma-norma susila, menumbuhkan sifat-sifat *mahmudah* (terpuji) serta berpikir obyektif yang dimanifestasikan dengan :

- a. Percaya kepada diri sendiri.
- b. Menyadari posisi serta tugas yang dipercayakan.

- c. Mengeliminir sikap egoistis dan individualistis.
- d. Memandang jauh ke depan atau berantisipasi.
- e. Memperhitungkan latar belakang setiap tindakan.
- f. Menghargai dan memperhitungkan waktu.

6) Terwujudnya Masyarakat Religius

Masyarakat religius yang dimaksud adalah masyarakat yang menghayati, mengamalkan dan menjadikan agamanya itu sebagai pegangan dan tuntutan hidup, berbuat, bertingkah laku dan bertindak berdasarkan dan sesuai dengan garis-garis yang telah terkhitah dalam agamanya.

H. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teori mengenai suatu cara/metode, atau cabang logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (*knowledge*). Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. (Juliansah Noor 2011 : 22).

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegunaan dari metodologi yaitu untuk menentukan cara ilmiah yang didasar kepada ciri-ciri keilmuan agar suatu penelitian yang di teliti menjadi lebih Rasional, Empiris dan Sistematis.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dengan pertimbangan bahwa terdapat tiga agama di desa tersebut yang menarik penulis guna melakukan penelitian integrasi agama di Desa Klepu.

2. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam penelitian konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu. Burhan Bungin (2001:75)

Selanjutnya jenis kajian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan adalah tehnik analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan analisa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti ,dan dipelajari secara utuh.

Menurut Creswell (dalam Juliansah Noor 2011:34), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suat gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori

dimanfaatkan sebagai pemadu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar terhadap landasan teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Adapun dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

3. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. (Suharsimi Arikunto, 2002:122).

Dalam penentuan informan di penelitian ini penulis menggunakan Purposive Sampling yaitu dengan cara sengaja karena alasan-alasan yang diketahui sifat dari sampel tersebut atau menetapkan informan yang dianggap tahu dalam masalah yang sedang diteliti secara mendalam (Nyoman Kutha Ratna, 2010:229). Oleh sebab itu dalam penelitian ini informan yang ditentukan adalah sebagai berikut :

 Kepala Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

- ✚ Kepala Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
- ✚ Sekertaris Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
- ✚ Kaur Pemerintahan Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
- ✚ 1 orang tokoh agama Islam di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
- ✚ 1 orang tokoh agama Katholik di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
- ✚ 3 (tiga) orang warga masyarakat di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Sehingga informan yang diambil dalam penelitian ini berjumlah berjumlah 9 orang.

TABEL I

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jenis Kelamin	Agama	Status
1	Sugeng Prasetyo, S.Sos, MM	Laki-laki	Islam	Sekretaris Kecamatan Sooko
2	Partomo, S.Sos	Laki-laki	Islam	Kepala Desa Klepu
3	Sajuto	Laki-laki	Islam	Sekretaris Desa Klepu
4	Dwi Priwulang	Laki-laki	Katolik	Kaur Pemerintahan Desa Klepu
5	H. Ismail	Laki-laki	Islam	Pemuka Agama Islam
6	Romo Bowo	Laki-laki	Katolik	Pemuka Agama

				Katolik
7	Endrawan Setianto	Laki-laki	Katolik	Wiraswasta
8	Suwandi, S.Pd	Laki-laki	Katolik	Guru SMA 1 Pulung
9	Mamaik Sri Budiarti S.Pd	Perempuan	Katolik	Guru SMP 1 Sooko

Sumber : Data Pribadi

4. Metode Pengumpulan Data

Data adalah suatu yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu terkait suatu masalah yang sedang di teliti sehingga akan dapat diperoleh keterangan terhadap permasalahan suatu hal sehingga dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu dengan jelas sesuai dengan kenyataan yang terjadi. (Muhamad Idrus : 99)

Di dalam penelitian ini, penulis mengalami sedikit permasalahan di dalam pengambilan data terutama proses wawancara, dimana sebelum melakukan wawancara kepada masyarakat terlebih dahulu penulis telah diperingatkan oleh perangkat desa bahwa di dalam teks wawancara disarankan untuk tidak terlalu dalam menyinggung perbedaan agama, dikarenakan ada sebagian masyarakat yang dikawatirkan tersinggung dan menyulitkan penulis di dalam penyusunan penulisan ini.

a. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan seandainya (Suharsimi Arikunto: 2001).

b. Wawancara (Interview)

Menurut Juliansyah Noor (2011:138) wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara merupakan cara dalam pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Tehnik Analisis data

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisa data kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Seperti yang dikemukakan oleh Moh.Nazir dalam (Robby:2010) demikian “Metode Deskripsi adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, obyek, suatu set kondisi social pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang”.

Alasan peneliti menggunakan Metode Deskripsi adalah :

- a. Pemaparan dalam metode deskriptif memungkinkan peneliti dapat menemukan dan memecahkan permasalahan yang ada.

- b. Pemaparan metode yang deskriptif dapat menjadikan pedoman bagi peneliti untuk menafsirkan data.
- c. Pelaksanaan metode tidak terbatas pada pengumpulan data sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasi data.

Begitu seluruh data yang diperoleh telah selesai dikumpulkan semuanya di analisis lebih lanjut secara intensif. Menurut Milles dan Huberman (1992), langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut :

- a. Penyusunan Data

Kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data sebelum melakukan analisa data, perlu dilihat alat ukur pengumpulan data antara lain dokumentasi dan wawancara atau gabungan keduanya.

- b. Reduksi Data

Dalam tahap ini peneliti melakukan penelitian dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan tranformasi data kasar yang diperoleh.

- c. Penyajian Data

Peneliti menggambarkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah bentuk teks cerita atau naratif.

- d. Analisa Data Kesimpulan

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.

Dari pengertian di atas dalam menganalisis data yang diperoleh setelah melalui tahap pengumpulan data, langkah berikutnya penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu cara berfikir induktif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju kearah kesimpulan.